



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI BANTEN

SIARAN PERS

BPK Banten Serahkan LHP LKPD Tahun 2022 kepada Pemerintah Kabupaten Serang

Serang, 17 Mei 2023 – Kepala Perwakilan BPK Banten, **Emmy Mutiarini** menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Kabupaten Serang Tahun 2022 kepada Ketua DPRD Kabupaten Serang, H. Bahrul Ulum, S.Ag., M.AP. dan Bupati Serang, Hj. Ratu Tatu Chasanah, SE., M.Ak. di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Banten, Serang (17/5).

Pemeriksaan atas LKPD merupakan bagian dari tugas konstitusional BPK. Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK Perwakilan Provinsi Banten atas LKPD Kabupaten Serang Tahun 2022, termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Serang, maka BPK memberikan opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** dengan Penekanan atas Suatu Hal pada Catatan 5.8.4 atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Serang.

Namun demikian, tanpa mengurangi keberhasilan yang telah dicapai Pemerintah Kabupaten Serang, BPK masih menemukan permasalahan terkait pengelolaan keuangan daerah. Permasalahan-permasalahan yang harus segera ditindaklanjuti antara lain:

1. Penyertaan Proses Penyelesaian Kewajiban atas Likuidasi PT Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Ciomas Membebani Keuangan Pemerintah Kabupaten Serang;
2. Pertanggungjawaban Belanja Barang dan Jasa BOS oleh sembilan Satuan Pendidikan tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya;
3. Penatausahaan Persediaan pada Pemerintah Kabupaten Serang belum tertib; dan
4. Pengelolaan Aset Tetap belum memadai.

Pasal 20 UU Nomor 15 Tahun 2004 mengamanatkan bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi LHP Dimana Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK, tentang tindak lanjut atas rekomendasi laporan hasil pemeriksaan selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP diterima.

Berdasarkan data rekapitulasi pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK per Semester II 2022, Pemerintah Kabupaten Serang telah menindaklanjuti 977 rekomendasi dari 1.108 rekomendasi atau **88,18%** dari seluruh rekomendasi periode 2005 – 2022. Dengan demikian masih terdapat 131 rekomendasi (11,82%) yang harus menjadi prioritas untuk segera ditindaklanjuti..

Dalam sambutannya Emmy Mutiarini menyampaikan harapannya agar Pimpinan DPRD dapat ikut memantau penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan yang terdapat dalam LHP ini sesuai dengan kewenangannya. “Kami berharap agar hasil pemeriksaan tersebut dapat memberikan dorongan dan motivasi untuk terus memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan APBD,” ungkap Emmy Mutiarini.